

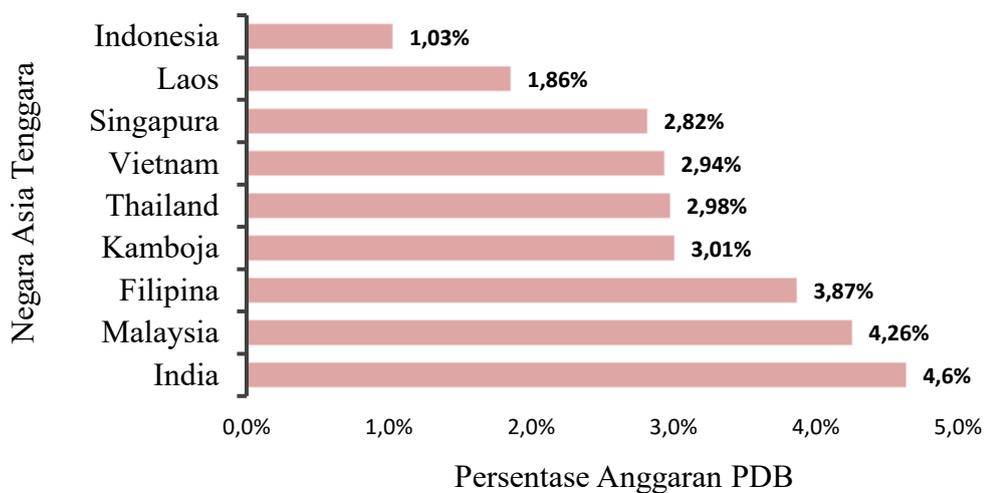
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keterbatasan dana sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, karena proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembiayaan pendidikan yang menunjang keberlangsungan pendidikan. Berapa banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan. Hal ini dikarenakan negara masih kurang menyadari bahwa belum cerdasnya kehidupan bangsa, belum majunya kebudayaan nasional dan belum sejahteranya kehidupan rakyat secara berkeadilan, akarnya adalah karena masih rendahnya kualitas manusia (Fihana, 2024: 201).

Semua negara maju adalah negara yang sejak mulai proses pembangunan bangsa telah meletakkan pendidikan sebagai elemen utamanya dan diberi alokasi anggaran pendidikan yang memadai (Maharani dkk., 2024: 26). Berdasarkan data UNESCO pada 9 negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa rata-rata alokasi anggaran pendidikan dunia dari tahun 1970 hingga 2023 adalah sebesar 3,05% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Grafik Rata-rata Alokasi Anggaran Pendidikan di Dunia

Sumber : Diadaptasi dan dimodifikasi dari UNESCO (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 Negara di Asia Tenggara dengan alokasi tertinggi adalah India yang mencapai 4,64%, sedangkan Indonesia berada di posisi terendah yang hanya mengalokasikan 1,03% dari PDB untuk pendidikan. Statistik ini mencerminkan adanya kesenjangan global dalam komitmen pendanaan pendidikan, yang berbanding lurus dengan mutu SDM dan kemajuan suatu negara. Sehingga dapat dilihat bahwa pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal sederhana. Karena bagaimanapun bagusnya rancangan kurikulum, matangnya perencanaan pendidikan, akan tetapi ketika sampai pada tahap operasional terbentur dengan keterbatasan biaya, maka perencanaan yang bagus tersebut kurang berarti, bahkan mungkin program pendidikan yang direncanakan akan sulit terealisasi (Rusdiana, 2021: 5). Sehingga di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.

Namun alokasi anggaran yang terjadi saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyebut “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Adapun realisasi APBN yang terjadi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1. 2 Grafik Realisasi dana APBN

Sumber : Diadaptasi dan dimodifikasi dari LKPP (2024)

Data realisasi APBN menunjukkan bahwa anggaran pendidikan belum optimal sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, bahkan kondisinya semakin memburuk selama empat tahun terakhir, yaitu: 2020 (18,25%), 2021 (17,21%), 2022 (15,51%), 2023 (16,45%), dan 2024 (16,94%) dari 20% APBD yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia. Penyerapan anggaran yang rendah mengakibatkan banyak institusi pendidikan berjalan apa adanya dan belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sehingga berimplikasi pada terbatasnya dana operasional sekolah, pelatihan guru, dan perawatan sarana-prasarana. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, dituntut kesungguhan dari para elite politik, para pelaku pendidikan agar mampu mengembangkan sistem pendidikan sehingga lembaga mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerahnya (Huda dkk., 2022: 170).

Fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di berbagai wilayah, sehingga sulit untuk mencapai keberhasilan pendidikan secara merata. Untuk menciptakan hal itu diperlukan manajemen pembiayaan yang baik dan dukungan guru yang berkualitas, sehingga dapat terciptanya pendidikan yang bermutu.

Mutu sekolah dapat dilihat salah satunya dengan tertib administrasi. Dengan adanya pengelolaan administrasi yang baik, sekolah dapat berfungsi dengan efisien dan efektif, serta dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Andriani & Hidayat, 2023: 216). Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pengawasan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada, baik secara material, personel, maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan yang efisien (Herlina dkk., 2022: 252).

Pengelolaan administrasi dimulai dari pengelolaan administrasi yang bersifat harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester hingga tahunan. Sehingga ketepatan, keakuratan dan kecepatan penyajian data/informasi merupakan faktor penting dalam mengelola administrasi yang baik. Selain itu, efektivitas administrasi pendidikan dapat membantu institusi dalam meningkatkan daya saing dan akreditasi (Sidabutar dkk., 2024: 34). Dalam hal ini untuk memastikan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan diperlukan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik.

Menurut Depdiknas, manajemen pembiayaan pendidikan dapat digambarkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengatur keuangan sekolah dengan melakukan penganggaran, pembukuan, pengeluaran, pemeriksaan, dan pertanggung jawaban keuangan. Biaya pendidikan menurut Cohn (1979: 62) dapat dikategorikan menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung (Akdon dkk., 2015: 6). Biaya langsung yaitu biaya yang meliputi biaya fasilitas belajar seperti buku pelajaran, buku perpustakaan, alat laboratorium, serta gaji guru. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang meliputi biaya hidup, biaya jajan, dan biaya kendaraan (Badrudin dkk., 2022: 24).

Dalam penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana, sehingga penyelenggara pendidikan diharapkan mampu mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan (Supriatna dkk., 2023: 3). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen dalam pembiayaan pendidikan agar segala arus biaya pendidikan dapat terkendali, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas terpenuhi dengan baik.

Hasil studi awal menunjukkan potensi tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Karya Budi Cileunyi memiliki kualifikasi pendidikan yang mayoritas lulusan S1 dan jenis kepegawaian yang didominasi oleh pegawai PNS/P3K seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Potensi Guru di SMA Karya Budi Cileunyi

Kualifikasi Pendidikan			Jenis Kepegawaian	
D1/SLTA	S1	S2/S3	PNS/P3K	GTT/Honorar
1	2	3	4	5
4	33	5	36	6
10%	78%	12%	86%	14%

Sumber : Dibuat dan dimodifikasi dari profil SMA Karya Budi Cileunyi (2025)

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan S1, yakni sebesar 78%, diikuti oleh lulusan S2/S3 sebesar 12%, dan lulusan D1/SLTA sebesar 10%. Sementara dari aspek jenis kepegawaian, sebanyak 86% merupakan pegawai PNS/P3K dan sisanya 14% adalah GTT/Honorar. Data ini menggambarkan bahwa secara kuantitatif, sumber daya manusia di SMA Karya Budi Cileunyi telah memenuhi standar minimal kualifikasi pendidikan dan status kepegawaian yang memadai. Namun, meskipun secara administratif sudah baik, efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan dan pengalokasian dana pembiayaan masih memerlukan optimalisasi agar keberadaan SDM yang potensial tersebut benar-benar mampu mendorong tercapainya mutu pendidikan secara menyeluruh.

Berdasarkan pengamatan penulis selama program Praktik Latihan Profesi (PLP) dan wawancara yang dilakukan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung dengan Ibu Zulfa selaku staf tata usaha pada Selasa, 05 November 2024 penulis mendapat keterangan bahwa pengelolaan administrasi di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah permasalahan, di antaranya yaitu: 1) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi alokasi dan penggunaan dana pendidikan secara tepat. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga potensi penggunaan dana secara maksimal untuk menunjang proses pembelajaran belum dapat terwujud; 2) Banyaknya jumlah siswa yang memiliki tunggakan pembayaran di sekolah hingga setelah kelulusan, menyebabkan ijazah ditahan oleh pihak sekolah; 3) Peminjaman ijazah asli oleh alumni untuk keperluan melamar kerja namun tidak dikembalikan, pencatatan peminjaman yang tidak rapi dan terstruktur, diperparah oleh data kontak alumni yang jarang diperbarui, mengakibatkan pihak sekolah kesulitan melakukan pelacakan dokumen yang hilang dan pengelolaan arsip secara akurat. Permasalahan ini menunjukkan perlunya inovasi manajemen pembiayaan yang lebih sistematis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi sekolah.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik tidak hanya mencakup penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran dan transparan. Sebaliknya, kelemahan dalam pengelolaan dana pendidikan akan menurunkan kualitas administrasi, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Administrasi Pendidikan (Penelitian di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung)”**.

Pentingnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan memahami pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan strategis bagi pihak sekolah, pengelola pendidikan, dan pemangku kebijakan di SMA Karya Budi Cileunyi dalam merumuskan strategi pembiayaan yang lebih efektif dan efisien, sehingga pengelolaan administrasi pendidikan dapat berjalan secara optimal dan mendukung terwujudnya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, manajemen pembiayaan pendidikan yang diimplementasikan dengan baik dapat mendorong efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan. Maka diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoretis dan praktis berguna bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan tujuan yang akan dicapai.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk khasanah ilmu pengembangan manajemen pendidikan Islam khususnya pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

- a. Bagi subjek penelitian, diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan yang berguna sebagai acuan untuk memaksimalkan pembiayaan yang dilakukan di lembaga pendidikan.
- b. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan yang mungkin bisa dipakai sebagai pemecahan masalah terkait manajemen pembiayaan serta pengelolaan administrasi pendidikan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memberikan sumbangan data dan ilmu terkait pencapaian pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari dua poin, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan dan efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan.

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Menurut Levin (1987) dalam buku Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkatan yang berbeda-beda (Akdon dkk., 2017:28) Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh operasional pendidikan. Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah memastikan ketersediaan dan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai standar pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi (Syukri dkk., 2024: 607). Adapun fungsi pembiayaan pendidikan dalam desentralisasi dan otonomi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan (Hidayat & Rusdiana, 2022: 37).

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan Thomas H. Jones menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan dana (*budgeting*), tahap pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian (*auditing*) (Jones, 1985: 118). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Departemen Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa, manajemen pembiayaan mencakup kegiatan pencatatan, pelaksanaan, serta pengawasan atau pelaporan dana keuangan (Syukri dkk., 2024: 607).

a. Penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Untuk mengefektifkan

pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka pihak yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Dalam hal ini penyusunan RKAS memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

b. Pelaksanaan (*accounting*)

Pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

c. Penilaian atau evaluasi (*auditing*)

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam keuangan manajemen sekolah, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan sekolah selaras dengan anggaran-anggaran belanja yang telah ditetapkan (Jahari, 2014: 94).

Jika tiga aspek ini dilaksanakan secara profesional, manajemen pembiayaan pendidikan dapat beroperasi secara efektif dan efisien, mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas Pengelolaan Administrasi Pendidikan

Menurut Good Carter V di dalam buku *Dictionary of Education* edisi kedua 1959, dinyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan (Purwanto, 2014: 4). Pengelolaan administrasi sekolah meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan data siswa, dan pengelolaan berbagai kegiatan sekolah (Andriani & Hidayat, 2023:

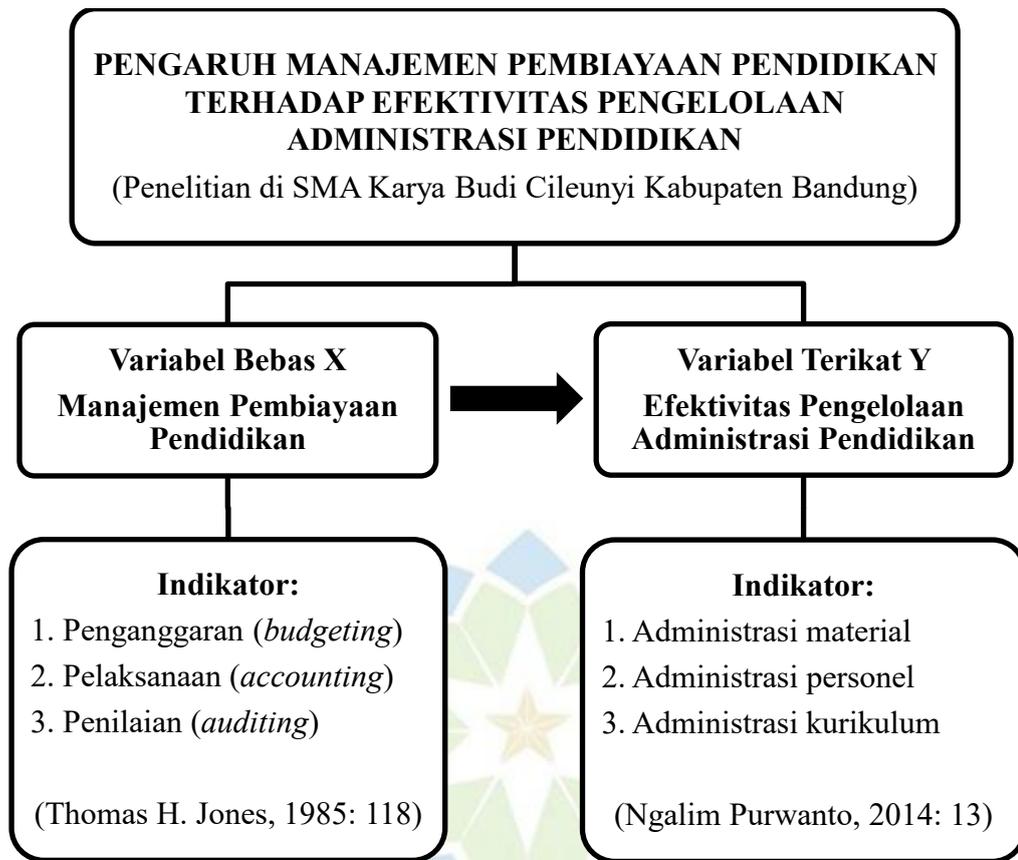
2016). Administrasi sekolah yang baik akan memastikan terselenggaranya kegiatan sekolah dengan lancar dan tertib. Dalam hal ini efektivitas kegiatan administrasi dapat dilihat dari *input* yang merata, *output* yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang.

Bidang-bidang garapan pengelolaan administrasi pendidikan sangat luas, di antaranya yaitu administrasi material, administrasi personel, dan administrasi kurikulum (Purwanto, 2014: 13).

- a. Administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi/benda-benda seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, gedung dan alat-alat perlengkapan sekolah, dan lain-lain.
- b. Administrasi personel, mencakup di dalamnya administrasi personel guru dan pegawai sekolah, dan juga administrasi murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan supervisi kepegawaian memegang peranan yang sangat penting.
- c. Administrasi kurikulum, yang mencakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, seperti antara lain pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus atau rencana pengajaran tahunan, persiapan harian dan mingguan.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pengelolaan administrasi sekolah yang efektif perlu melibatkan perencanaan yang baik, pemantauan yang berkelanjutan, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan administratif. Oleh karena itu, administrasi pendidikan harus dipahami bukan hanya oleh kepala sekolah atau pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, tetapi juga harus diketahui dan dijalankan oleh para guru dan pegawai-pegawai sekolah sesuai dengan fungsi jabatannya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, skema dari kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Bagan Kerangka Berpikir

Sumber : Dibuat dan dikembangkan oleh peneliti (2025)

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung.

H_a: Terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi pendidikan di SMA Karya Budi Cileunyi Kabupaten Bandung.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperdalam kajian dalam penelitian ini, berikut beberapa literatur yang relevan:

1. Skripsi Mufida Yulia Aziza (2024), Judul “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan di MAN 1 Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan secara simultan mempengaruhi mutu pendidikan di MAN 1 Kabupaten Bogor sebesar 73,9% sedangkan sisanya 26,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mufida Yulia Aziza dan penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, dan gambaran lembaga pendidikan yang berbeda.
2. Skripsi Zirly Ainaya Sabrina (2022), Judul “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Lulusan di MTS Khazanah Kebajikan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan Pendidikan terhadap mutu lulusan di MTs Khazanah Kebajikan ditemukan nilai sebesar determinasi (R^2) sebesar 0,609 (60,9%), sedangkan sisanya 39,1% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zirly Ainaya Sabrina dan penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, dan gambaran lembaga yang berbeda.
3. Tesis Muhammad Arifin (2022), Judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Guru di SDIT Al-Hamidiyah Kota Depok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pembiayaan dimulai dari penetapan pagu yang didasarkan pada hasil PPDB yang menjadi dasar penyusunan APBS. 2) Evaluasi pembiayaan meliputi dua bentuk yaitu evaluasi keuangan yang dilakukan oleh divisi keuangan yayasan dalam bentuk laporan realisasi APBS dan evaluasi program yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk LPJ kegiatan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin

dan penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y, metode penelitian, lokasi penelitian yang digunakan, dan gambaran lembaga pendidikan yang berbeda.

4. Jurnal Badrudin dkk (2022), Judul “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Guru di Madrasah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *R Square* yaitu 26,0% kesejahteraan guru dipengaruhi oleh manajemen pembiayaan, dan sebesar 74,0% dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dkk dan penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, dan gambaran lembaga pendidikan yang berbeda.
5. Jurnal Yusril Dwi Mahendra dkk (2023), Judul “Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MIN5 Ponorogo dapat meningkatkan kompetensi akademik dan professional guru, meningkatkan mutu pengajaran intrakurikuler, dan ekstrakurikuler, menguatkan budaya madrasah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, terampil, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yusril Dwi Mahendra dkk dan penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel X, lokasi penelitian yang digunakan, metode penelitian yang diambil, dan gambaran sekolah yang berbeda.
6. Skripsi Putri Rahayu (2023), Judul “Pengelolaan Administrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi masih kurang efektif, tingkat kepatuhan sekolah sudah sangat baik, serta kemampuan administratif staf terbilang masih kurang maksimal di SMAN

1 Ingin Jaya Aceh Besar. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahayu dan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan administrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, metode penelitian yang diambil, dan gambaran lembaga pendidikan yang berbeda.

7. Skripsi Zakky Mubarak (2023), Judul “Pengelolaan Administrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan di MTSN 4 Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan administrasi dalam meningkatkan kinerja kependidikan dilakukan setiap awal tahun dan pada akhir tahun diadakan evaluasi. 2) Pelaksanaan administrasi dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di MTsN 4 Aceh Besar, memiliki kebijakan-kebijakan tertentu, untuk membuat kebijakan tersebut diadakan rapat setiap bulan dan setiap 3 bulan sekali akan diadakan evaluasi pelaksanaan administrasi dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zakky Mubarak dan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan administrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, dan metode penelitian yang diambil.
8. Jurnal Lin Herlina dkk (2021), Judul “Implementasi Pengelolaan Administrasi dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di sekolah dasar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran jika terdapat staf khusus yang mengelola. Staf khusus tersebut merupakan staf ketatausahaan yang mengelola semua administrasi pendidikan di sekolah dasar. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lin Herlina dkk dan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan administrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, metode penelitian yang diambil, dan gambaran lembaga pendidikan yang berbeda.

9. Jurnal Nurintan Maghfirah dkk (2024), Judul “Strategi Pengelolaan Administrasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Terpadu Muhammadiyah 36 Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan administrasi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD terpadu Muhammadiyah 36 Medan adalah melakukan perencanaan terkait tujuan yang akan dicapai, melakukan pengorganisasian dalam pembagian tugas, melakukan penggerakan dengan memotivasi dan berkomunikasi dengan administrator, melakukan pengawasan serta melakukan evaluasi hasil kerja administrator. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurintan Maghfirah dkk dan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan administrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel Y, lokasi penelitian yang digunakan, metode penelitian yang diambil, dan gambaran lembaga pendidikan yang berbeda.
10. Skripsi Kasmawati (2024), Judul “Strategi Kepala Tata Usaha Dalam Pengelolaan Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keritang Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Tata Usaha memastikan manajemen keuangan dan inventaris sekolah lancar dengan pengawasan kas, anggaran yang cermat, dan evaluasi pengeluaran transparan. Penjadwalan pemeliharaan rutin, organisasi tim pemeliharaan, dan respons cepat terhadap masalah pemeliharaan dijalankan. Komunikasi efektif dengan staf dan pihak terkait dipertahankan melalui pertemuan rutin, pelatihan, dan evaluasi. Menegakkan aturan sekolah dengan prosedur jelas dan bekerja sama dengan guru dan staf keamanan untuk menjaga keamanan lingkungan. Program pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan staf administrasi sesuai kebutuhan sekolah dengan evaluasi menyeluruh. Semua ini menyoroti peran penting KTU dalam mengelola administrasi sekolah demi kinerja dan kesejahteraan sekolah yang lebih baik. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati dan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan administrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel X, lokasi penelitian yang digunakan, dan metode penelitian yang diambil.